

**BENTUK BUM DESA YANG BERSTATUS BADAN HUKUM
BERDASARKAN PASAL 117 PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN
BUMN DAN BUMD
(STUDI KASUS BUM DESA DI KABUPATEN SLEMAN)**

Oleh:
Hafaza Ihsannovsi¹, Sulistiowati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implikasi yuridis BUM Desa yang berstatus badan hukum berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dibandingkan dengan BUMN dan BUMD. BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki karakteristik yang unik sehingga bentuk badan hukum serta implikasi yuridisnya terutama dalam hal tata kelola berbeda dengan BUMN dan BUMD.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa merupakan badan hukum tersendiri dengan karakteristik khusus (*sui generis*) yang tidak dapat disamakan dengan BUMN maupun BUMD. BUM Desa dengan karakteristik khusus tersebut memiliki tata kelola yang lebih menekankan pada pengelolaan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta dikombinasikan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Kata kunci: Bentuk BUM Desa, tata kelola, *good corporate governance*.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Guru Besar Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

***FORM OF BUM DESA WITH LEGAL ENTITY STATUS
BASED ON ARTICLE 117 GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF
LAW NUMBER 2 OF 2022 AND GOVERNMENT REGULATION NUMBER
11 OF 2021 COMPARED WITH BUMN AND BUMD
(CASE STUDY OF BUM DESA IN SLEMAN REGENCY)***

By:

Hafaza Ihsannovsi¹, Sulistiowati²

ABSTRACT

This research aims to analyze the form and juridical implication of BUM Desa with legal entity status based on Article 117 Government Regulation in Lieu of Law Number 11 of 2020 and Government Regulation Number 11 of 2021 compared with BUMN and BUMD. BUM Desa as a legal entity has unique characteristics so that the form of legal entity and juridical implication especially in term of governance are different from BUMN and BUMD.

This research is a normative and empirical research using statutory approaches and conceptual approaches. The data used in this research consisted of primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants and respondents while secondary data was obtained from literature review. Analysis of the data used in this study using a qualitative – descriptive method.

Result of the research show that BUM Desa is a separate legal entity with special characteristics (sui generis) that cannot be equated with BUMN or BUMD. BUM Desa with this special form has governance that places more on management based on the spirit of kinship and mutual-cooperation and combined with management based on the principles of good corporate governance.

Keyword: *Form of BUM Desa, governance, good corporate governance.*

¹ Undergraduate Student at Business Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

² Professor at Business Law Department, Faculty of Law Gadjah Mada University.